

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam Melalui Program Pendidikan

Eka Nurwahyuliningsih¹, Soni Akhmad Nulhaqim², Hadiyanto A. Rachim³

^{1 2 3}Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

E-mail Koresponden : eka20003@mail.unpad.ac.id

soni.nulhaqim@unpad.ac.id

hadiyantoarachim@unpad.ac.id

ABSTRACT

Indigenous community with residential locations that are quite far from reach make it difficult to access educational services that have been provided by the government. The need for education for remote community is something that needs to be pursued, considering the right to education for all citizens. Education plays a very important role in helping remote indigenous community understand life's problems, are able to think independently, create business opportunities and are sensitive to the times. It can be seen clearly that in remote indigenous community the critical ability of indigenous community is still weak, even the number of educated indigenous community is still lacking. Based on the 2013 BAPPENAS, it is stated that some of the indigenous peoples hope that education can be used to defend themselves and deal with outsiders without loss. This article discusses an approach used in empowering community to achieve a good standard of living. This study is based on a literature study by examining several credible reference sources consisting of news articles, the latest scientific articles and books that are relevant to the topic of discussion. This article focuses on the importance of education for indigenous community, empowerment through an educational approach is one of the provisions obtained by indigenous community in adapting to current changes and facing the challenges of this modern era.

Keywords: Empowerment; Education; Remote Indigenous Community.

ABSTRAK

Komunitas adat dengan lokasi tempat tinggal yang cukup jauh dari jangkauan menyebabkan sulit mengakses layanan pendidikan yang telah disediakan oleh pemerintah. Kebutuhan pendidikan bagi komunitas adat terpencil menjadi hal yang perlu diupayakan, hal ini mengingat adanya hak atas pendidikan bagi semua warga negara. Pendidikan sangat berperan untuk membantu komunitas adat terpencil dalam memahami persoalan hidup, mampu berpikir mandiri, kreatif menciptakan peluang usaha dan peka terhadap tuntutan zaman. Dengan kasatmata dapat dilihat bahwa di lingkungan permukiman komunitas adat terpencil kemampuan kritis komunitas adat masih lemah bahkan jumlah kaum terdidik dikalangan komunitas adat masih kurang. Berdasarkan publikasi Bappenas tahun 2013, disebutkan bahwa beberapa dari masyarakat adat mengharapkan pendidikan dapat digunakan untuk mempertahankan diri dan berhadapan dengan orang luar tanpa dirugikan. Artikel ini membahas pendidikan sebagai suatu pendekatan yang digunakan dalam memberdayakan komunitas adat agar dapat mencapai taraf hidup yang baik. Kajian ini didasarkan pada studi literatur dengan menelaah beberapa sumber referensi yang kredibel terdiri dari artikel berita, artikel ilmiah terbaru dan buku yang sesuai dengan topik pembahasan. Artikel ini menitikberatkan pada pentingnya pendidikan bagi komunitas adat, pemberdayaan melalui pendekatan pendidikan menjadi salah satu bekal yang diperoleh komunitas adat dalam menyesuaikan diri dengan perubahan saat ini serta menghadapi tantangan zaman modern ini.

Kata Kunci: Pemberdayaan; Pendidikan; Komunitas Adat Terpencil.

PENDAHULUAN

Arus modernisasi serta globalisasi yang terjadi selama dua dekade menjadi ancaman terhadap keberlanjutan komunitas adat terpencil (Astarika et al., 2019). Keberadaan komunitas adat realitasnya sangat beragam, khususnya hal ini terkait dengan kondisi geografis, interaksi dengan budaya luar, dan akses pendidikan (Biantoro et al., 2018). Menurut Siregar (2002), Komunitas adat adalah komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur di satu wilayah geografis, memiliki kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, serta pengambilan keputusan diputuskan secara musyawarah. Komunitas adat terpencil merupakan bagian dari penduduk Indonesia, yang masih dipandang berada di lapisan paling bawah dalam struktur perkembangan penduduk (Andriyus et al., 2021).

Saat ini terdapat beberapa kondisi sulit yang dialami oleh komunitas adat, pertama yakni masih kurangnya perhatian dari pemerintah, swasta dan pemangku kepentingan terhadap peningkatan kualitas hidup pada komunitas adat; kedua yakni masih kurangnya kemampuan dalam menghadapi perubahan lingkungan yang menghasilkan sulitnya beradaptasi sehingga menyebabkan ketertinggalan dalam mencapai kehidupan yang sejahtera (Hadiyanti, 2009). Selain itu Suradi et al., (2019) menggarisbawahi bahwa komunitas adat erat kaitannya dengan kemiskinan yang menjadi masalah mendasar, hal ini ditandai dengan adanya status kesehatan yang rendah, lingkungan yang tidak sehat dan tingkat pendidikan yang rendah. Permasalahan yang dialami oleh komunitas adat terpencil memerlukan penanganan khusus oleh berbagai pihak, pemerintah sebagai pemangku kepentingan yang memiliki kekuatan untuk melakukan berbagai upaya dalam memperbaiki kualitas hidup komunitas adat terpencil.

Pendidikan menjadi salah satu cara untuk dapat memberdayakan komunitas adat terpencil. Komunitas adat terpencil memiliki hak yang sama serta setara dengan masyarakat umum lainnya untuk memperoleh pendidikan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dijelaskan bahwa seluruh masyarakat Indonesia berhak atas pendidikan tanpa adanya suatu diskriminasi dalam segala bentuk, kemudian

memperoleh fasilitas sekolah gratis sampai tingkat pendidikan dasar. Menurut Misya & Asrida, (2017) Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang baik, dengan adanya pendidikan dapat menjadi harapan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pemberdayaan memiliki dua pengertian kunci yakni kekuasaan dan kelompok lemah (Ife, 1995). Menurut Suharto (2014), secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) seringkali dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang diinginkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan komunitas adat terpencil adalah serangkaian kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang diarahkan pada upaya pemberian kewenangan dan kepercayaan kepada komunitas adat terpencil untuk menemukan masalah dan kebutuhan beserta upaya pemecahan masalah berdasarkan kekuatan dan kemampuan sendiri melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial.

Lebih lanjut, kegiatan pemberdayaan melalui program pendidikan bagi komunitas adat terpencil tidak dapat disamakan dengan pendidikan pada sekolah umumnya karena permasalahan sosial yang dihadapi sifatnya sangat kompleks meliputi segi kehidupan (Nurhaliza et al., 2018). Mampu meningkatkan kualitas dan ketahanan hidup melalui pendidikan, dalam pelaksanaannya berfokus pada pemeliharaan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal, pelibatan tokoh adat, perlindungan potensi dan budaya lokal serta pengoptimalan kekayaan lokal (Yogaswara & Zamjani, 2019).

Kajian mengenai pemberdayaan komunitas adat terpencil telah banyak dilakukan, namun masih berfokus dalam konteks pemberdayaan ekonomi, permukiman dan kearifan lokal (Wazan et al., 2020; Sidiq, 2020; Mardiyati & Gutomo, 2018; Mayliza & Adiando, 2019), sementara kajian mengenai pendidikan bagi komunitas adat terpencil beberapa masih didominasi oleh pendidikan non formal (Saripudin, 2009; Nurazizah, 2018; Nurazizah, 2018; Sari et al., 2018; Sukarma, 2019). Pembahasan mengenai pemberdayaan melalui program pendidikan baik pendidikan formal

maupun non formal bagi komunitas adat terpencil suku anak dalam masih terbatas jumlahnya, sementara itu pendidikan menjadi hal yang penting khususnya bagi komunitas adat terpencil suku anak dalam untuk meningkatkan kualitas hidup dan menerima perubahan zaman modernisasi.

METODOLOGI

Artikel ini bertujuan untuk membahas terkait dengan pemberdayaan komunitas adat terpencil suku anak dalam melalui program pendidikan. Fokus pembahasan artikel pada konseptualisasi pemberdayaan dan program pendidikan bagi komunitas adat terpencil. Lebih lanjut, artikel ini merupakan suatu kajian literatur. Studi literatur menjadi langkah awal dalam pengumpulan data dan merupakan tahapan yang penting ditengah keterbatasan waktu di lapangan. Beberapa referensi seperti artikel ilmiah, buku dan hasil laporan penelitian terdahulu yang masih memiliki keterkaitan dengan topik pembahasan sangat membantu dalam memperkaya landasan teori dan analisis yang digunakan. Referensi diperoleh dari berbagai data base seperti *google scholar*, *researchgate*, dan situs website Kementerian Sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pendidikan di Lokasi Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam

Pendidikan menurut suku anak dalam masih dianggap sebagai suatu ancaman bagi kelompok (Baharudin, 2010), hal ini dinilai dapat memberikan pengaruh yang tidak baik terhadap adat serta takut akan mendapatkan bencana jika mereka mengikuti kegiatan pendidikan (sekolah). Ketidakingintahuan mengenai pendidikan membuat komunitas suku anak dalam tidak mengenal angka dan huruf yang menyebabkan tidak bisa membaca, menulis serta berhitung (Nurhaliza et al., 2018). Hal tersebut menyebabkan komunitas suku anak dalam sering tertipu jika sedang melakukan transaksi ekonomi di pasar atau di lingkungan masyarakat non suku anak dalam.

Eksplotasi dan pembukaan hutan yang masif mengakibatkan terjadinya perubahan pada

suku merjinal di wilayah Sumatera. Perubahan tersebut lambat laun mengubah pandangan suku anak dalam terhadap pendidikan. Pendidikan diharapkan mampu menjadi senjata bagi komunitas adat terpencil suku anak dalam atau yang dikenal dengan sebutan orang rimba dalam mempertahankan diri dan berhadapan dengan orang luar non orang rimba. Terdapat beberapa alasan mengapa pendidikan sangat penting bagi komunitas adat yakni agar komunitas adat mampu mengikuti perubahan zaman, sehingga dapat mengantisipasi jika terjadi hal yang tidak diinginkan dengan pengetahuan yang dimiliki. Namun pada kenyataannya, komunitas adat masih mengalami ketertinggalan dalam dunia pendidikan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kendala biaya, hambatan akses, keterbatasan sarana dan tenaga pengajar (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013).

Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi salah satu faktor pendorong terhadap pembangunan nasional (Wahyudin & Z, 2014). Hal ini menuntut semua warga masyarakat untuk memiliki kemampuan yang sangat mendasar yaitu kemampuan membaca, menulis, berhitung dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Prinsip pemberdayaan perlu dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal sebagai daya tampung dan daya dukung, kondisi dilakukan agar komunitas adat dapat terlibat langsung dalam kegiatan bukan hanya sebagai objek melainkan juga sebagai subjek pembangunan (Suyanto & Mujiyadi, 2015). Mengenai hal tersebut, metode pendidikan perlu disesuaikan dengan kebudayaan dari komunitas adat terpencil, lantaran kunci keberhasilan kegiatan ini adalah dengan memberikan pemberdayaan melalui model pendidikan yang berbasis kearifan lokal (Astarika et al., 2019).

Pemberdayaan Melalui Program Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan yang dimiliki oleh orang, terutama kelompok rentan dan lemah, sehingga hal ini mengharuskan kelompok tersebut mampu memiliki kekuatan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menjangkau sumber-sumber yang memungkinkan dapat meningkatkan pendapatan (Suharto, 2014). Selain itu menurut pandangan (Zastrow, 2017)

pemberdayaan merupakan sebuah proses untuk membantu individu, keluarga, kelompok dan organisasi serta komunitas dapat meningkatkan kekuatan interpersonal, pribadi, politik dan sosial ekonomi, sehingga dapat memperbaiki kondisinya. Komunitas adat terpencil selaku kelompok yang masuk dalam kategori kelompok rentan perlu dibekali kegiatan pemberdayaan berupa program pendidikan, kondisi ini agar komunitas adat terpencil mampu menolong dirinya sendiri.

Menurut Christenson dan Robinson, terdapat empat perspektif pemberdayaan yang digunakan untuk melihat pemberdayaan yakni Proses, berkaitan dengan tahapan awal dalam kegiatan pemberdayaan serta berkaitan dengan *sustainable development*; Metode, yakni cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dari kegiatan pemberdayaan; Program, daftar kegiatan yang berkaitan dengan tujuan pemberdayaan; dan Gerakan sosial, menghasilkan berbagai gerakan sosial sesuai dengan dinamika yang ada pada sasaran pemberdayaan (Nurhaliza et al., 2018). Selanjutnya, berdasarkan pendapat Suharto (2014:67) untuk mencapai tujuan pemberdayaan maka dilakukan beberapa pendekatan pemberdayaan yang terdiri dari pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan.

Perhatian yang diberikan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan bagi komunitas adat dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan. Adapun kegiatan pemberdayaan melalui program pendidikan, sebagai berikut:

Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana

Pembangunan berupa asrama tempat tinggal diperuntukan suku anak dalam yang menyambung pendidikan, di mana jarak menuju sekolah masih sulit diakses. Fasilitas tersebut dibangun agar dapat memberikan kenyamanan bagi anak-anak selama mengikuti kegiatan pendidikan (Misya & Asrida, 2017). Selain itu terdapat fasilitas sarana gedung kegiatan belajar masyarakat (KBM) yang tersedia disetiap kecamatan yang masih terdapat komunitas adat terpencil. Selanjutnya berdasarkan identifikasi kebutuhan yang telah dilakukan oleh Asra et al., (2018), terdapat pemberian bantuan sarana dan

prasarana pendidikan kepada komunitas adat terpencil untuk meningkatkan pemahaman dalam belajar mengaji dan praktik ibadah berupa perlengkapan mengaji dan sholat.

Penyuluhan pendidikan kepada komunitas adat terpencil

Pemberdayaan melalui program pendidikan dimulai dengan memberikan penyuluhan oleh penyuluh sosial kepada masyarakat adat suku anak dalam, dengan mendatangi langsung permukiman suku anak dalam baik yang berada di dekat wilayah masyarakat non SAD maupun yang berada di pedalaman, kemudian kegiatan penyuluhan dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat di suatu tempat atau aula (Tristo, 2018). Penyuluhan tersebut bertujuan agar komunitas adat terpencil memiliki kesadaran bahwa pendidikan merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap individu, serta pendidikan berguna untuk meningkatkan kualitas diri dan kesejahteraan (Asra et al., 2018). Penyuluhan tidak hanya dilakukan oleh penyuluh sosial saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh LSM seperti KKI Warsi yang berada di TNBD melakukan pendekatan untuk memberikan penyuluhan pemberdayaan pendidikan dengan cara pendidikan alternatif bagi orang dewasa maupun anak-anak dari komunitas adat terpencil (Nurhaliza et al., 2018). Penyuluhan tersebut penting dilakukan mengingat peningkatan pendidikan harus dilakukan sesegera mungkin.

Penyelenggaraan pendidikan formal dan informal

Demi meningkatkan kualitas pendidikan serta menekan angka putus sekolah, pemerintah daerah selaku pemangku kepentingan turut berkontribusi dalam memberikan pelayanan guna mendukung keberlangsungan pemberdayaan program pendidikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan pelayanan pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

Kegiatan pemberdayaan mengharuskan komunitas adat terpencil mengikuti kegiatan program pendidikan wajib belajar 12 tahun mulai dari pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, selanjutnya akan diberikan program beasiswa melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin yang

diperuntukkan untuk membeli perlengkapan sekolah (Misya & Asrida, 2017). Hal tersebut dilakukan karena sebagian besar penduduk suku anak dalam belum sekolah, banyak dari mereka yang tidak menamatkan pendidikan dibangku Sekolah Dasar, apalagi yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (Tristo, 2018).

Pendidikan nonformal atau pendidikan alternatif dengan menyelenggarakan pendidikan melalui sekolah paket A, B, C serta memberikan kegiatan keaksaraan bagi komunitas adat agar memiliki kemampuan membaca, menulis dan berhitung (Misya & Asrida, 2017). Kegiatan keaksaraan dasar meliputi membaca suku kata yang terdiri atas huruf vokal dan konsonan; membaca teks dan memahami isi bacaan; menulis kata dengan kalimat sederhana; menulis teks narasi; melakukan operasi aritmatika dasar (Nurazizah, 2018). Selain itu terdapat pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (KBM) yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan, serta kegiatan lainnya yang diberikan yakni dengan memberikan sosialisasi hidup bersih, sehat dan teratur serta peningkatan *softskill* untuk memperbaiki mutu dan taraf hidup (Nurhaliza et al., 2018).

KESIMPULAN

Komunitas adat terpencil suku anak dalam sebagai warga negara berhak memperoleh pendidikan, hal ini telah dijamin dalam undang-undang. Pendidikan diyakini mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemberdayaan komunitas adat terpencil melalui program pendidikan terdiri dari beberapa kegiatan yakni pembangunan fasilitas sarana dan prasarana, penyuluhan kepada ketua adat dan orang tua dari suku anak dalam, dan penyelenggaraan program pendidikan berupa pendidikan formal yakni pendidikan sekolah dasar hingga pendidikan sekolah menengah atas, selanjutnya terdapat pendidikan non formal seperti pendidikan alternatif dan kegiatan belajar masyarakat serta peningkatan keterampilan bagi penerima manfaat. Selain itu terdapat program beasiswa pendidikan yang diperuntukan khusus untuk anak-anak komunitas adat terpencil.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyus, A., Febrian, R. A., Handrisal, H., & Adni, D. F. (2021). Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(01), 63–74. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i01.3660>
- Asra, R., Naswir, M., Kalsum, U., & Lestari, A. P. (2018). Peningkatan Kualitas Pendidikan untuk Anak Suku Anak Dalam di Dusun Selapik, Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.22437/jkam.v2i1.5424>
- Astarika, R., Endang, P., & Sulastris, E. (2019). Membangun Sumber Daya Manusia Berkelanjutan pada Komunitas Adat Terpencil (Studi Kasus Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit Duabelas Jambi). *Jurnal Inovasi Sains Dan Teknologi (INSTEK)*, 2(1), 52–62. <https://doi.org/10.51454/instek.v2i1.97>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2013). Masyarakat Adat di Indonesia : Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif. In *Kementerian PPN/Bappenas*.
- Baharudin. (2010). Pendidikan Suku Anak Dalam: Suatu Perubahan dari Paradigma Positivistik ke Konstruktivisme. *Forum Ilmiah Jurnal Bunga Rampai*, 07 (02).
- Biantoro, S., Basuki, I. S., Solihin, L., Yogaswara, H., & Afriansyah, A. (Eds.). (2018). *Pendidikan Kontekstual (Masyarakat Adat di Indonesia)*. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hadiyanti, P. (2009). Pemberdayaan Masyarakat Adat Terpencil Melalui Model Pendidikan Luar Sekolah. *Jurnal Ilmiah VISI PTK-PNF*, 4(2), 197–203. <https://doi.org/10.21009/jiv.0402.8>
- Mardiyati, A., & Gutomo, T. (2018). Kemandirian dan pemberdayaan komunitas adat terpencil di kabupaten

- merangin. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 42(3), 263–274.
- Mayliza, M., & Adiando, A. (2019). Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Bonai. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 41. <https://doi.org/10.31258/jkp.10.1.p.41-46>
- Misya, M. V. S., & Asrida, W. (2017). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendidikan di Komunitas Adat Terpencil Desa Sesap Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011-2014. *JOM FISIP*, 4(1), 1–13.
- Nurazizah, N. (2018). Pengembangan Perangkat Pembelajaran Pendidikan Keaksaraan Dasar Berbasis Kearifan Lokal Pada Komunitas Adat Terpencil (Kat) Suku Dayak Meratus. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi PGTK PAUD Dan Dikmas*, 13(2), 123–134. <https://doi.org/10.21009/jiv.1302.6>
- Nurhaliza, S., Indraddin, & Azwar. (2018). Pemberdayaan Pendidikan Orang Rimba Di Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) Oleh KKI Warsi. *Sosial Budaya*, 15(2), 151–159.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
- Sari, T. P., Kamaruddin, & Tugiman. (2018). Shifting Perceptions of Education Indigenous Communities on Kundur Island Karimun Regency Riau Archipelago Province. *Jurnal Online Mahasiswa: Fakultas Ilmu Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 5(1), 1–14.
- Saripudin, D. (2009). Pendidikan Non Formal Masyarakat Adat di Indonesia: Tinjauan Awal. *International Journal of Learner Diversity*, 2(1), 35–44.
- Sidiq, R. S. S. (2020). Model Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Reformasi*, 10(2), 217–227. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1954>
- Suharto, Edi. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sukarma, I. W. (2019). Pengembangan Kearifan Lokal Seni Budaya Melalui Pendidikan Berbasis Banjar di Bali. *Proceeding of 2nd International Conference of Arts Language And Culture*, 1, 21–32.
- Suradi, Nulhaqim, S. A., Mulyana, N., & Suharto, E. (2019). Indigenous Peoples, Poverty and the Role of Social Workers. *Asian Social Work Journal*, 4(1), 11–19.
- Suyanto, & Mujiyadi, B. (2015). Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Melalui Pelayanan Terpadu Di Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Sosio Konsepsia*, 4(2), 15–36. <https://doi.org/10.33007/ska.v4i2.113>
- Tristo, R. (2018). Peningkatan kesadaran pentingnya pendidikan bagi suku anak dalam provinsi sumatera selatan melalui penyuluhan sosial. *Quantum*, XIV, 51–66.
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wahyudin, U., & Z, S. N. (2014). Strategi Pendidikan Keaksaraan Fungsional Berbasis Konteks Lokal untuk Pengembangan Komunitas Adat Terpencil di Papua. *Proceeding Seminar Nasional "Selamatkan Generasi Bangsa Dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal," 2006*, 198–207.
- Wazan, S., Astuti, R. S., Kismartini, K., & Afrizal, T. (2020). Pengelolaan Kawasan Wisata Suku Anak Dalam Berbasis Kearifan Lokal. *Perspektif*, 9(2), 418–427. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3884>
- Yogaswara, H., & Zamjani, I. (Eds.). (2019). *Pendidikan Kontekstual Masyarakat Adat Di Indonesia*. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Zastrow, C. (2017). *Introduction to Social Work and Social Welfare*. United States: Cenage Learning.